

Bupati Banyuwangi: Festival Imlek Jadi Media Merajut Keragaman

BANYUWANGI (IM)- Bupati Banyuwangi, Ipuk Piestiandani mengatakan Festival Imlek menjadi media untuk merajut harmoni keragaman mulai lintas iman, suku dan bangsa di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

Hal ini disampaikan Bupati Ipuk pada peringatan Tahun Baru Imlek dan sekaligus meluncurkan program Kampung Moderasi Beragama di kawasan Klenteng Hoo Tong Bio di Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi, Sabtu (4/2) malam. "Festival Imlek ini benar-benar menjadi media untuk merajut harmoni antarkeagaman di Banyuwangi," katanya saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Tahun Baru Imlek yang juga diisi berbagai rangkaian festival itu.

Bupati Ipuk juga mengapresiasi peluncuran Kampung Moderasi Beragama di kawasan Klenteng Hoo Tong Bio karena hal itu mengesakan rasa kebersamaan dan gotong royong serta dengan harmoni tersebut akan menjadi bekal untuk memajukan Banyuwangi.

"Kebersamaan dan gotong royong semua pihak inilah kunci bagi Banyuwangi untuk maju. Kita belajar dari pandemi COVID-19 kemarin. Dengan kebersamaan dan gotong royong bersama kita semua bisa melewatinya dengan cukup baik," ucapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, M Lutfi menjelaskan bahwa Kampung Moderasi Beragama ini bentuk upaya menyatukan berbagai perbedaan terutama dalam hal agama atau kepercayaan untuk saling menghargai dan menjunjung toleransi.

"Program Kampung Moderasi Beragama ini merupakan sinergi Pemkab Banyuwangi dengan Kantor Kementerian Agama," katanya.

Peluncuran Kampung Moderasi Beragama pada peringatan Tahun Baru Imlek ini, kata Lutfi, semakin meriah dengan penampilan drama musik dan sendratari yang melambangkan keberagaman dan kerukunan antar-umat dan suku bangsa di Bumi Blambangan itu. "Ada sekitar 80 anak muda lintas iman menyajikan aneka tari dan musik yang dirangkai dalam kisah harmoni," ujar dia.

Dalam kegiatan Festival Imlek Banyuwangi ini juga dihadiri berbagai tokoh lintas agama, di antaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi K.H. Mohammad Yamin, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Banyuwangi, Pendeta Anang. ● pra

IDN/ANTARA

LOMBA LUKIS LAMPION DI MADIUN

Peserta melukis lampion saat mengikuti lomba lukis lampion di Kota Madiun, Jawa Timur, Minggu (5/2). Lomba yang diikuti 25 pelajar SMP tersebut dalam rangka perayaan Cap Go Meh.

SELESAI TENDER DI LPSE

91 Paket Proyek Konstruksi di Pandeglang Segera Dikerjakan

Ke-91 paket proyek fisik yang sudah selesai tender meliputi proyek pembangunan jalan, jembatan, tembok penahan tanah, serta infrastruktur lainnya. Ke-93 paket sudah selesai lelang dini, kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat.

PANDEGLANG (IM)- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang menyebutkan bahwa sebanyak 91 paket proyek konstruksi tahun anggaran 2023 telah selesai tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pandeglang.

Ke-91 paket proyek fisik yang sudah selesai tender meliputi proyek pembangunan jalan, jembatan, tembok penahan

tanah, serta infrastruktur lainnya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat mengatakan, awal tahun 2023 ini ada 93 paket sudah selesai lelang dini. "Sebanyak 91 paket proyek fisik konstruksi dan dua paket konsultasi pengawas. Itu pekerjaan bidang DAK jalan," katanya, Minggu (5/2).

Asep menjelaskan, paket konsultasi pengawas pertama itu untuk ruas jalan Cibitung-

Lebak. Kemudian yang kedua konsultasi pengawas untuk jalan Cikupaun-Turus.

"Khusus paket infrastruktur yang sudah selesai ditenderkan sebetulnya 91 paket infrastruktur dan dua paket konsultasi pengawas. Anggarannya sekira Rp68 miliar," katanya.

Selain paket proyek tersebut masih ada paket yang tender tahun berjalan. Saat ini masih dalam proses perencanaan di tahun berjalan dulu setelah itu baru proses fisik konstruksinya.

"Adapun untuk program Jakamantul (Jalan Kabupaten Mantap Betul) ada dari APBD, dari DAK, Banku, dan juga dari dana aspirasi Anggota DPR RI (Yang dibawa oleh Rizki Natakusumah Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat). Kemudian kita juga tengah mencoba mengajukan ke Kementerian PUPR," katanya.

Di Kementerian PUPR

saat ini tengah ada program penanganan jalan daerah. "Ya mudah-mudahan kita dapat lagi. Program penanganan jalan daerah ini di luar dari anggaran saat ini," katanya.

Program tersebut sekarang sedang diproses oleh Kementerian PUPR. Dengan persyaratan juga sangat ketat.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita berkeinginan pembangunan jalan kabupaten 80 persen sudah selesai. Kalau berdasarkan hasil perhitungan sesuai target RPJMD itu pertahun melaksanakan perbaikan jalan sepanjang 13 kilometer.

"Hal itu berdasarkan hasil perhitungan panjang jalan totalnya 723,03 kilometer dikalikan 80 persen. Jadi sepanjang 578 kilometer dan sudah dalam kondisi baik tahun 2020 sepanjang 512 kilometer jadi untuk mencapai 80 persen itu targetnya sepanjang 66 kilometer selama kurun waktu

lima tahun," katanya.

Bila melihat target RPJMD, pelaksanaan pengerjaan pembangunan jalan melalui program Jakamantul sudah melebihi target. Soalnya pada tahun 2022 saja sudah diselesaikan pengerjaan sepanjang 50,74 kilometer.

"Sementara kalau targetnya itu 13 kilometer. Jadi kalau melihat target RPJMD maka susah lebih sepanjang 37,74 kilometer," katanya.

Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Ade Juliansyah menambahkan, bahwasanya 91 paket fisik konstruksi sudah selesai lelang akan segera dilaksanakan penandatanganan kontraknya.

"Setelah selesai penandatanganan kontrak maka pemenang tender bisa langsung melaksanakan pengerjaan. Ada perbaikan jalan, tembok penahan tanah, dan juga jembatan," katanya. ● pra

IDN/ANTARA



AKSI MEMUNGUTI SAMPAH DI CFD SOLO

Siswa dan guru SD Pangudi Luhur Solo melakukan sosialisasi untuk memunguti sampah yang berserakan saat kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (5/2). Aksi tersebut diharapkan juga dapat mengedukasi warga untuk turut peduli lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di area CFD.

40 Persen Hutan Pulau Bintan Rusak

BINTAN (IM)- Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Bintan - Tanjungpinang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan 40 persen dari 52 hektare kawasan hutan di Pulau Bintan dalam kondisi rusak.

Kepala KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang, Ruah Alim Maha di Bintan, Minggu (5/2), mengungkapkan hutan di Pulau Bintan, berada di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, terdiri atas hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Kawasan hutan yang rusak itu didominasi hutan produksi.

"Kawasan hutan di Bintan yang dalam kondisi rusak jauh lebih luas dibanding Tanjungpinang," ujarnya.

Ruah mengemukakan rata-rata kerusakan hutan disebabkan alih fungsi kawasan hutan dan pembalakan liar. KPHP Unit IV Bintan - Tanjungpinang sedang mendalami alih fungsi hutan yang dilakukan untuk kegiatan usaha.

"Boleh dikelola atau dimanfaatkan, namun harus prosedural karena kawasan tersebut tetap harus dirawat," katanya.

Polisi kehutanan juga melakukan sosialisasi secara rutin agar masyarakat tidak merusak hutan lindung. ● pra

Alun-alun di Pondok Aren Dibangun Tahun Depan

TANGSEL (IM)- Pemerintah Kota Tangsel akan membangun alun-alun di Kecamatan Pondok Aren. Rencananya pembangunan itu dilaksanakan tahun depan.

Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan, melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024, salah satu usulan masyarakat Pondok Aren adalah meminta pembangunan alun-alun. "Waktu saya ke Musrenbang ke Kecamatan Pondok Aren, masyarakat meminta dibangun alun-alun. Kami rencanakan pembangunannya tahun depan," ujar Pilar, Minggu (5/2).

Pilar mengatakan, pembangunan alun-alun ini akan menggenapi rencana yang sama di Kecamatan Pamulang. "Di

Pamulang juga usulannya pembangunan alun-alun. Ini bagus ya, jadi tempat rekreasi masyarakat dan juga menjadi simbol dari wilayah mereka," jelas Pilar.

Sementara itu, Camat Pondok Aren, Hendra, mengapresiasi usulan masyarakatnya. Menurut Hendra pembangunan alun-alun sedikit banyak berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. "Setidaknya masyarakat bisa berdagang di alun-alun. Tapi dengan tempat yang nantinya sudah disediakan. Lau alun-alun jadi tempat rekreasi sederhana masyarakat," ujar Hendra, Minggu (5/2).

Hendra mengatakan, selain mengusulkan pembangunan alun-alun, masyarakatnya juga banyak mengusulkan diredoviasinya saluran drainase mengantisipasi banjir. ● pp

Bandung Raya Terancam Krisis Air Tanah

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), meminta warga menabung air hujan untuk disimpan guna mengatasi masalah penurunan muka air tanah. Pemanfaatan yang berlebihan untuk berbagai keperluan membuat stok air tanah di wilayah Bandung Raya kini tergolong kritis.

Berdasarkan data dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Badan Geologi menyebut muka air tanah artesis di wilayah Bandung telah turun lebih dari 40 meter di bawah muka tanah. Penurunan muka air itu disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan terutama industri, hotel dan faktor lainnya.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan kondisi muka air tanah yang terus menurun bisa membahayakan. Fenomena penurunan muka air tanah bisa mengakibatkan permukaan tanah turun. "Kalau air hujan yang datang menetes ke rumah kita, itu semua masuk ke lahan kita, ditabung jadi bisa jaga sama-sama air tanah," kata Yana, Minggu (5/2).

Menurut Yana, menjaga lingkungan termasuk air tanah

merupakan upaya dan kewajiban bersama, bukan hanya pemerintah. Oleh karenanya, sembari pemerintah berupaya membatasi penggunaan air tanah, warga Kota Bandung pun diminta melakukan hal serupa. "Pemkot sudah melakukan beragam cara untuk mengatasi persoalan air tanah yang semakin dalam di Kota Bandung di antaranya menabung air lewat kolam retensi, biopori, hingga drumpori. Jadi itu tugas kita semua bukan tugas pemerintah saja," ungkapnya.

Kepala PATGTL Badan Geologi, Rita Susilawati mengatakan beberapa wilayah di Bandung telah mengalami kondisi air tanah yang kritis hingga rusak. Hal itu dibuktikan dengan penurunan muka air tanah yang kian dalam hingga 40 meter. "Berdasarkan sumur pantau air tanah, muka air tanah artesis di Bandung telah turun lebih dari 40 meter di bawah muka tanah," ucapnya.

Rita merinci berdasarkan analisis Badan Geologi, wilayah Rancaekek, Leuwigajah, serta beberapa wilayah lain masuk kategori yang muka air tanahnya rusak. Penurunan muka air itu disebabkan oleh pengambilan air tanah untuk

berbagai keperluan, terutama industri, hotel dan faktor lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air, air tanah didefinisikan sebagai air yang terdapat di lapisan batuan di bawah permukaan tanah. Para ahli berpendapat, definisi air tanah, menurut Bouwer pada 1978, merupakan sejumlah air di bawah permukaan bumi yang kemudian dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan, atau sistem drainase dengan pemompaan. Dapat juga disebut aliran yang secara alami akan mengalir ke permukaan tanah melalui rembesan atau suatu pancaran.

Adapun air tanah memiliki berbagai manfaat penting bagi kehidupan, tak hanya manusia tapi beragam makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, air tanah berfungsi memenuhi kebutuhan berbagai keperluan rumah tangga, seperti air minum, mandi, memasak, dan mencuci. Sedangkan untuk kebutuhan kolektif, air tanah bermanfaat untuk irigasi pertanian, sumber pembangkit listrik, memenuhi berbagai kebutuhan industri. ● yan

BPN Tangsel Ajak Kejari Tagih PSU yang Belum Diserahkan Pengembang

TANGSEL (IM)- Setelah mematok 132 bidang tanah aset milik Pemkot Tangsel, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tangsel juga akan menggarap Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU). Kepala BPN Tangsel, Harison Mocodompis mengatakan, pihaknya telah mengetahui bahwa keberadaan PSU di Tangsel belum jadi milik Pemkot Tangsel.

Padahal PSU menjadi kewajiban pengembang menyerahkannya ke Pemkot Tangsel sesuai amanat Perwal Nomor 89 Tahun 2022 dan Perubahan Atas Perwal Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembangunan Serta Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Skala Kecil Mandiri. "PSU-PSU yang belum dilaporkan dan diserahkan juga akan kita selesaikan," ujar Harison, Minggu (5/2).

Harison mengatakan, pi-

haknya berencana akan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tangsel dalam menagih PSU-PSU yang belum diserahkan pengembang kepada Pemkot Tangsel. "PSU-PSU yang belum dilaporkan dan diserahkan mungkin ditagih sama bu Kejari, saya yang sertifikatkan," ujar Harison.

Sebelumnya BPN Tangsel telah memasang 500 patok tanah yang menjadi aset milik Pemkot Tangsel. Pematokan ini adalah upaya BPN Tangsel mengamankan aset-aset milik Pemkot Tangsel dan merupakan gerakan pemasangan 1 juta patok tanah yang diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI "Gerakan pemasangan 500 patok di Tangsel terdiri dari 132 bidang tanah yang tersebar di 10 Kelurahan dan 6 Kecamatan," ujar Harison di Perumahan Palembang Indah, Kecamatan Setu, Jumat (3/2) lalu. ● pp



WISATA KULINER TRADISIONAL DI SUMUT

Sejumlah pengunjung menikmati jajanan tradisional di Pasar Pekan Sarapan Karya Anak Muda (Pasar Kamu) di Desa Denai Lama, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (5/2). Wisata kuliner tradisional yang dibuka setiap hari minggu tersebut menyuguhkan berbagai macam kuliner dan pementasan budaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

IDN/ANTARA